



**LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE  
REPUBLIK CEKO  
15 –21 JULI 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (UU PPP) merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). UU PPP kini telah berlaku lebih kurang delapan tahun lamanya. Selama UU PPP berlaku, berbagai masalah terkait pelaksanaan undang-undang tersebut, kerap muncul. Mulai dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 92/PUU-X/2013 sampai dengan adanya benturan kepentingan antarlembaga kementerian akibat diundangkannya peraturan pelaksanaan dari UU PPP. Badan Legislasi sendiri berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan yang dilakukannya, juga mendapat banyak masukan atas pelaksanaan UU PPP. Berbagai masukan tersebut, antara lain terkait pengaturan sistem “*carry over*” RUU Prioritas setiap akhir masa jabatan DPR. Di sisi lain, dari pihak Pemerintah Pusat berdasarkan kebutuhan yang ada, juga menghendaki agar UU PPP diubah dengan menambahkan suatu materi muatan baru terkait pembentukan pusat legislasi nasional (*laws center*).

Berdasarkan pemikiran tersebut, DPR, DPD, dan Presiden, sepakat untuk melakukan perubahan atas UU PPP. Kesepakatan perubahan UU PPP tersebut sebagaimana ternyata dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019 (Prolegnas 2019). Secara umum, perubahan UU PPP dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok materi muatan perubahan. Pertama, mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan. Kedua, mengatur mengenai prosedur atau tata cara dalam pembentukan. Ketiga,

mengatur mengenai peran dan koordinasi kelembagaan. Keempat, mengatur mengenai peran dari sistem pendukung. Kelima, mengatur mengenai penyempurnaan lampiran UU PPP. Kelima kelompok materi perubahan tersebut, dilakukan dengan memperhatikan Putusan MK, hasil pemantauan dan peninjauan Badan Legislasi DPR, serta saran dan masukan yang berasal dari para pemangku kepentingan terkait (akademisi, praktisi, dan masyarakat).

Perubahan UU PPP terkait tahapan dalam pembentukan, dilakukan dengan memasukkan tahap pengawasan peraturan perundang-undangan. Perubahan UU PPP terkait prosedur atau tata cara dalam pembentukan, dilakukan dengan memasukkan materi muatan Putusan MK, dan hal-hal lain terkait penyempurnaan dalam tata cara pembentukan. Perubahan UU PPP terkait peran dan koordinasi kelembagaan dilakukan dengan mengadakan penyempurnaan aturan terkait peran dan koordinasi kelembagaan pada lembaga perwakilan, Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah. Perubahan UU PPP terkait peran dari sistem pendukung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengatur secara lengkap ketentuan mengenai perancang, peneliti, tenaga ahli, serta jabatan lain yang diperlukan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Hasil kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen serta memperluas wawasan dan pengetahuan delegasi Badan Legislasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta implementasinya yang akan menjadi bahan masukan kongkret untuk Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, dari kunjungan kerja ini juga diharapkan adanya kerja sama antar parlemen kedua negara yang lebih erat.

## **C. AGENDA KEGIATAN**

Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan pada tanggal 15 – 21 Juli 2019. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Praha, Ceko dan Komisi Hukum dan Konstitusi Republik Ceko.

#### D. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Republik Ceko adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANG	N A M A	FRAKSI	KET
1	553	DRS. SUDIRO ASNO., AK.	PHANURA	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	388	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., M.H	PGERINDRA	KETUA BALEG
3	193	ARIF WIBOWO	PDI P	WK. KETUA BALEG
4	287	M. SARMUJI, SE., M.SI.	PGOLKAR	WK.KETUA BALEG
5	489	H. TOTOK DARYANTO, SE.	PAN	WK. KETUA BALEG
6	196	EVA KUSUMA SUNDARI	PDI P	ANGGOTA BALEG
7	321	DR. SAIFUL BAHRI RURAY, SH., M.SI.	PGOLKAR	ANGGOTA BALEG
8	357	H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.SI.	PGERINDR A	ANGGOTA BALEG
9	453	DR.IR. BAHRUM DAIDO, M.Si	PDEMOKR AT	ANGGOTA BALEG
10	494	YANDRI SUSANTO, S.PT.	PAN	ANGGOTA BALEG
11	71	DRS. H. IBNU MULTAZAM	PKB	ANGGOTA BALEG
12	539	H.M. ADITYA MUFTI ARIFIN, SH.	PPP	ANGGOTA BALEG
13	34	H.M. LUTHFI ANDI MUTTY	PNASDEM	ANGGOTA BALEG
14	-	LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.	SEKRETARIAT	
15	-	ROSDIANA, SH., M.H.		
16	-	AJENG NORLIANA, SE., M.S.	TENAGA AHLI	

#### E. SEKILAS MENGENAI CEKO

Republik Ceko (Cekia; bahasa Ceko: Česká republika) adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang terbentuk setelah bubarnya negara Cekoslowakia. Negara ini berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan

utara, dengan Polandia di sebelah utara, dengan Slowakia di sebelah tenggara dan dengan Austria di sebelah selatan

Di negara ini terletak Sudetenland di mana dahulu tinggal suku bangsa Jerman, tetapi setelah Perang Dunia II, sebagian besar mereka dideportasi meskipun masih banyak orang Ceko yang menyandang nama Jerman. Di tanah Sudeten banyak terdapat industri, terutama industri kerajinan kristal dan bir.

Bedasarkan konstitusi, Republik Ceko adalah sebuah negara demokrasi parlementer dengan kepala negara seorang presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabat 5 tahun. Presiden memiliki hak veto dalam legislasi, hak imunitas, dan bisa membubarkan parlemen dalam keadaan tertentu. Ia juga memilih perdana menteri serta anggota kabinet berdasarkan usulan dari perdana menteri.

Parlemen Ceko (Parlament) adalah sebuah parlemen bikameral yang terdiri dari Poslanecká sněmovna yang terdiri dari 200 kursi dengan masa jabat 4 tahun dan Senát yang terdiri dari 81 kursi dengan masa jabat 6 dan 2 tahun.

## **F. HASIL KEGIATAN**

### **1. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Praha, Ceko.**

Delegasi diplomasi parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh oleh Bapak Musurifun Lajawa (*Minister Counsellor*). Pada acara ramah tamah tersebut Bapak Musurifun Lajawa sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena hubungan politik antara Indonesia dan Ceko sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem politik di Ceko yang terbuka dan kebijakan Indonesia yang lebih memperhatikan negara-negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Kerjasama yang telah dilakukan yaitu militer/pertahanan.

Pada kesempatan itu pula pimpinan delegasi diplomasi parlemen Badan Legislasi menyampaikan maksud dari kunjungan yaitu untuk mempelajari dan mengkaji beberapa hal pokok, mengenai;

- Pertama, tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Republik Ceko.

- Kedua, dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di Ceko, apakah dikenal sistem keberlanjutan atau *carry over*?
- Ketiga, mengatur mengenai prosedur atau tata cara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan adakah prosedur tersendiri mengingat pada saat ini Ceko tergabung dalam Uni Eropa maka tunduk kepada ketentuan hukum internasional, khususnya yang mengikat negara-negara Uni Eropa?
- Keempat, mengatur mengenai peran dan koordinasi kelembagaan.
- Kelima, mengatur mengenai peran dari sistem pendukung khususnya yang mengatur secara lengkap ketentuan mengenai perancang undang-undang, peneliti, tenaga ahli, serta jabatan lain yang diperlukan.

## **2. Pertemuan dengan Komisi Hukum Dan Konstitusi Republik Ceko.**

Anggota Diplomasi parlemen diterima oleh Mr. Marek Benda (*Chairman of the Committee on Constitutional and Legal Affairs of the Czech Chamber of Deputies*) dan Mrs Zuzana Ozanova – (*vice chairwoman of the Committee on Constitutional and Legal-Affairs*).

- Mr Marek Benda adalah seorang politikus Ceko dari Partai Demokrat Sipil. Pada saat ini Mr Marek Benda adalah anggota Chamber of Deputies of the Czech Republik dan ketua komisi konstitusi yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun.
- Di Republik Ceko yang dapat mengusulkan undang-undang antara lain pemerintah, anggota parlemen atau kelompok anggota parlemen, dan senat.
- Pemerintah sangat dominan dalam hal proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibantu oleh badan khusus yang disebut Badan Legislatif Pemerintah Ceko dan dari sisi parlemen ada institut parlemen yang menimbang dan memutuskan bahwa usulan undang-undang tidak bertentangan dengan Uni Eropa
- Selain Pemerintah sebagai pengusul rancangan undang-undang sebanyak 90%, sisanya diusulkan oleh parlemen.

- Komisi hukum pada saat ini mengusulkan 3x lipat rancangan undang-undang dibandingkan dengan komisi ekonomi atau komisi lainnya.
- Proses legislasi tidak terlalu cepat namun Republik Ceko tidak mengenal sistem 'carry over'. Ini termasuk UU Pertahanan yang tidak berlanjut karena prinsip demokratis dan *discontinue*. Ada juga UU tentang Kode Kewarganegaraan yang merupakan sesuatu yang rumit dan proses tersebut tetap dihentikan tetapi kemudian dapat diusulkan kembali dan prosesnya dari awal namun secara teknis dapat dipercepat.
- Jika usulan tersebut datangnya dari parlemen, yang dominan tetap pemerintah karena pemerintah berhak untuk memberikan masukan terhadap semua rancangan undang-undang atau bahkan merancang undang-undang.
- Biasanya kualitas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh oposisi kualitasnya lebih rendah namun menarik perhatian masyarakat.
- Selain itu senat juga dapat mengusulkan sebuah undang-undang.
- Di setiap kementerian mempunyai subdirektorat khusus yang menangani legislasi (tentunya dibawah menteri). Jika terdapat konflik tentunya harus diselesaikan oleh kementerian tersebut sebelum diusulkan menjadi sebuah usulan undang-undang dan diperbaiki oleh *Government Legislative Council (GLC)* yang terdiri dari pakar dan ahli, biasanya perbaikan atau usulan dari GLC dapat diterima dan dipatuhi.
- Tugas komite hukum/konstitusi adalah komite yang mengawasi hukum pada umumnya, hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata dan kehakiman/mahkamah. Seperti contoh ada hal khusus yang dibahas di kementerian kesehatan mengenai perlunya data pasien rumah sakit yang berada dibawah komite kesehatan nanti disajikan ke komisi hukum, apakah usulan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang lain.
- Sejak dibentuk *Government Legislative Council*, usulan pemerintah tidak wajib didiskusikan dengan DPR lagi. Badan ini bukan sebuah badan politik. Ketuanya dipilih oleh pemerintah dan tidak harus yang menjadi anggota DPR.

- Kemetrian dapat mengeluarkan peraturan khusus.
- Mahkamah konstitusi ceko yang dapat membatalkan undang-undang jika terlalu umum atau tidak konkrit.
- Rata-rata 1 persidangan menerima 5-8 rancangan undang-undang (bukan hanya amandemen) jadi rata-rata sekitar 40-60 UU yang disahkan per periode). Pada masa kampanye biasanya tidak terlalu produktif.

### ***Government Legislative Council (GLC)***

Badan Legislatif Pemerintah Ceko (selanjutnya disebut "GLC") adalah badan penasehat Pemerintah untuk pekerjaan legislatif Pemerintah. Dewan Legislatif telah dibentuk berdasarkan Pasal 28a dari Undang-Undang Dewan Nasional Ceko No. 2/1969 Sb. tentang pembentukan kementerian dan otoritas pemerintah pusat lainnya di Republik Ceko, 8 Januari 1969, sebagaimana telah diubah ("Statuta GLC").

GLC memiliki 30 anggota (termasuk khususnya para ahli eksternal yang melakukan pekerjaan untuk GLC hanya untuk kompensasi simbolis) dan pekerjaannya diatur dengan peraturan tersendiri.

Semua dokumen untuk agenda Dewan Legislatif Pemerintah dibahas oleh masing-masing inisiator yang kemudian diberikan kepada staf Departemen Legislatif Pemerintah; Departemen Kompatibilitas menyediakan khususnya untuk pekerjaan yang terkait dengan komitmen legislatif yang terjadi setelah Republik Ceko dari keanggotaannya di Uni Eropa dan mengoperasikan Sistem Informasi untuk Perkiraan Hukum - ISAP. Departemen Legislatif Pemerintah, di samping tanggung jawabnya yang luas, menyusun Rencana dan Prognosis Pekerjaan Legislatif Pemerintah. Manajemen metodologis dan dukungan untuk proses Penilaian Dampak Regulasi (RIA) di tingkat lembaga administrasi pusat disediakan oleh Divisi untuk Koordinasi Proses Penilaian Dampak Regulasi (RIA).

Pada 1 April 2016, total 9 komisi kerja telah dibentuk dalam GLC, sesuai dengan Art. 2 (e) dan Seni. 5 (2) dari amandemen Statuta Dewan Legislatif Pemerintah:

Komisi Hukum Publik I - Komisi Hukum Administrasi No. 1,

Komisi Hukum Publik I - Komisi Hukum Administrasi No. 2,  
Komisi Hukum Publik I - Komisi Hukum Administrasi No. 3,  
Komisi Hukum Publik II - Hukum Keuangan,  
Komisi Hukum Publik III - Hukum Perburuhan dan Urusan Sosial,  
Komisi Hukum Publik IV - Hukum Eropa,  
Komisi Hukum Perdata,  
Komisi Hukum Pidana,  
Komisi Penilaian Dampak Regulasi (RIA).  
GLC bertemu, sebagai suatu peraturan, setiap 14 hari sekali, kecuali ditentukan lain.

### **Proses legislasi di Republik Ceko**

Untuk memproses persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, proses dari pembentukan sebuah peraturan hukum, mulai dari diskusi dan proses persetujuan dari pemerintah, di tingkat parlemen dan persetujuan presiden. Proses ini diakhiri dengan publikasi dari sebuah peraturan perundang-undangan.

Pada proses legislasi, biasanya dipahami adanya beberapa aturan hukum seperti rancangan prinsip-prinsip umum hukum, undang-undang, rancangan undang-undang, peraturan-peraturan, dan peraturan pemerintah. Dari sudut pandang proses legislatif perlu dibedakan antara proses legislatif di tingkat pemerintah dan pada di tingkat parlemen. Di tingkat pemerintah, rancangan undang-undang, peraturan, dan peraturan pemerintah disiapkan. Dari proses ini hanya rancangan undang-undang yang diteruskan ke Parlemen; biasanya disebut rancangan peraturan pemerintah.

Selain dari rancangan peraturan pemerintah, ada juga rancangan peraturan non-pemerintah, yang merupakan hasil inisiatif legislatif dari pemerintah daerah atau kelompok deputi. Mekanisme penyusunan aturan hukum, termasuk cara mereka berdiskusi dan menyetujui diatur oleh aturan - oleh Peraturan Legislatif Pemerintah untuk aturan hukum di tingkat pemerintah, dan oleh Undang-Undang tentang Aturan Prosedur dari Kamar



Deputi (*in Czech only*) dan Undang-Undang tentang Aturan Prosedur Senat pada tingkat Parlemen (*in Czech only*).

### **1. Proses legislasi di tingkat pemerintah**

Proses pembentukan peraturan di tingkat pemerintah disiapkan oleh kementerian dan badan pusat administrasi negara lainnya (penyaji materi). Dalam proses persiapan pembentukan peraturan, presenter mereka harus bertindak sesuai dengan Peraturan Legislatif Pemerintah yang menetapkan aturan untuk konten dan bentuk aturan hukum yang disiapkan. Di antara persyaratan umum untuk aturan hukum termasuk analisis rinci tentang hukum dan masalah fakta; bagian yang sangat diperlukan adalah Penilaian Dampak Regulasi, yang disebut RIA (*in Czech only*). Persyaratan lebih lanjut yaitu keselarasan/keharmonisan dengan perjanjian internasional (*in Czech only*) dan tindakan hukum dari Komunitas Eropa dan Uni Eropa. Terakhir, ada juga persyaratan untuk kejelasan, kelengkapan, dan kejelasan aturan hukum.

#### **Prosedur Komentar**

Draf bahan legislatif disampaikan kepada badan-badan terkait (kementerian, badan pusat lainnya dari administrasi negara, daerah, Kantor Presiden, Kantor Kamar Deputi, Kantor Senat, dan lainnya) untuk dimintai pendapat atau masukan. Daftar badan-badan ini dinyatakan dalam Peraturan Legislatif Pemerintah. Pengusul dapat mengirimkan draf aturan hukum kepada siapa pun untuk mendapat masukan. Peraturan Legislatif Pemerintah bahkan menetapkan kewajiban untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang disiapkan disajikan secara online di mana perpustakaan peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

Batas waktu untuk memberikan masukan (komentar) adalah 15-20 hari kerja, tergantung pada jenis materi. Masukan dibagi menjadi masukan pokok dan lainnya yang biasanya dalam bentuk rekomendasi, proposal dan sejenisnya. Pengusul membahas masukan dengan badan masing-

masing dan memperbaiki draft rancangan berdasarkan masukan yang diterima. Jika ada masukan yang tidak mencapai kata sepakat, maka akan dilanjutkan pada level pertemuan pemerintah.

### **Peran Badan Legislasi Pemerintah *Government Legislativ Council (GLC)***

Badan Legislasi Pemerintah dan komisi-komisinya, sebagai badan penasihat pemerintah, juga terlibat dalam proses legislasi. Badan Legislativ Pemerintah memiliki batas waktu 60 hari untuk memberikan pendapatnya mulai dari hari penyerahan. Masukan akan sangat penting untuk debat pada pertemuan pemerintah, khususnya dalam hal materi yang masih menjadi konflik. Mengenai peraturan perundang-undangan yang akan dibahas, peran penting lainnya termasuk Departemen Kompatibilitas yang menilai rancangan undang-undang dari sisi harmonisasinya dengan *Acquis communitaire*, dan Komite Administrasi Publik (*in Chezh only*) yang menilai dampak regulasi .

### **Pertemuan pemerintah**

Setelah prosedur komentar, materi disampaikan ke pertemuan pemerintah. Bahan-bahan yang memerlukan diskusi atau bahan-bahan yang tidak disetujui diperdebatkan di bagian B dari pertemuan pemerintah. Ini adalah bagian dari setiap pasal yang masih memerlukan pendalaman dalam diskusi yang pada akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Sudut pandang Dewan Legislativ Pemerintah sangat dipertimbangkan sebagai masukan.

Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah diajukan ke pertemuan pemerintah. Dalam hal persetujuan rancangan undang-undang, keputusan diterbitkan disitus web Kantor Pemerintah [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz). Dalam hal persetujuan suatu RUU, maka RUU tersebut disahkan ke Kamar Deputi dalam bentuk RUU pemerintah. Peraturan Pemerintah yang disetujui diterbitkan dalam Kumpulan Hukum Republik Ceko. Regulasi adalah setelah diskusi dan persetujuan mereka dengan komisi Dewan Legislativ Pemerintah yang ditandatangani oleh masing-

masing anggota pemerintah atau oleh kepala badan terkait. Setelah itu mereka dapat diterbitkan dalam Kumpulan Hukum. Syarat dan ketentuan untuk menerbitkan aturan hukum dalam Kumpulan Hukum dinyatakan dalam Peraturan Legislasi Pemerintah yang disebutkan di atas.

Catatan: Proses legislasi di tingkat pemerintah yang diproses melalui perpustakaan elektronik dari Kantor Pemerintah Republik Ceko eKLEP. Ini berarti bahwa pengusul harus mengirimkan bahan ke dalam eKLEP baik dalam proses komentar maupun dalam penyerahannya ke pertemuan pemerintah. Aturan yang sama diterapkan pada sudut pandang Badan Legislasi Pemerintah. Seluruh proses berjalan secara elektronik; namun demikian, karena alasan kearsipan, selain mengirimkan materi ke eKLEP, ada tugas untuk mengirim kepada Perdana Menteri tiga salinan cetak yang ditandatangani oleh masing-masing anggota pemerintah (pengusul)

## **2. proses legislasi di tingkat parlemen**

Proses legislatif di tingkat parlemen rancangan undang-undang pemerintah dalam bentuk cetak dikirim oleh perdana menteri kepada ketua kamar deputy. Ketua kamar deputy mengirimkan teks rancangan undang-undang pemerintah kepada komite pengarah kamar deputy, untuk semua deputy dan kelompok politik deputy. Perdebatan tentang rancangan undang-undang pemerintah diadakan dalam kerangka tiga tahapan. Dalam hal rancangan undang-undang tersebut diadopsi oleh kamar deputy, rancangan undang-undang tersebut diteruskan kepada Senat.

## **3. Proses persetujuan presiden**

Setelah mendapat persetujuan dari senat, ketua kamar deputy menyerahkan setiap rumusan pasal kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Jika ada tindakan hukum yang disahkan kembali ke Kamar Deputy oleh Presiden dalam waktu 15 hari.

#### 4. Proses publikasi

Undang-undang mulai berlaku pada hari publikasi mereka di *the Collection of Laws* kecuali jika ada pengecualian yang selanjutnya ditetapkan, undang-undang mulai berlaku pada hari ke 15 setelah publikasi. Jika diperlukan kepentingan umum yang tidak mendesak, sangat dimungkinkan untuk adanya penyesuaian waktu berlakunya undang-undang tersebut.

#### F. KESIMPULAN

1. Pemerintah Republik Ceko memegang peran dominan sebanyak 90% dalam inisiasi pengusulan rancangan undang-undang.
2. Republik Ceko tidak menganut adanya sistem 'carry over' namun jika rancangan undang-undang yang diajukan cukup strategis dan belum selesai pada periode tersebut, maka dapat dilanjutkan pada periode berikutnya melalui proses yang sama namun dapat dipersingkat secara teknis dan terdapat semacam kesepakatan bahwa substansi substansi tertentu dalam rancangan undang-undang, utamanya yang sudah sempat dibahas dan dianggap tidak bermasalah akan diajukan kembali, umumnya oleh pemerintah sebagai pihak yang mengajukan kembali.
3. Pemerintah Ceko memiliki Badan Legislasi Pemerintah (Government Legislative Council) yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman atau Menteri khusus dengan tugas utama, yaitu memastikan adanya sinkronisasi semua rancangan undang-undang.
4. Terkait proses harmonisasi, Kementerian Dalam Negeri berperan penting untuk memastikan semua rancangan undang-undang di pusat dan daerah tidak ada yang bertentangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memastikan adanya ketersediaan anggaran untuk mendukung implementasi undang-undang.
5. Ada 4 tahapan dalam proses legislasi di Republik Ceko yaitu proses legislasi pada tingkat pemerintah, proses legislasi pada tingkat parlemen, persetujuan presiden, dan publikasi.
6. Presiden Republik Ceko dan Senat mempunyai Hak Veto (menolak) terhadap RUU yang diajukan oleh DPR. Namun sampai saat ini tingkat

keberhasilan veto Presiden relatif rendah karena sebagian besar rancangan undang-undang yang dikembalikan kepada DPR tetap diundangkan.

## **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Republik Ceko. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, AGUSTUS 2019**  
**DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**KETUA DELEGASI,**

**TTD**

**DRS. SUDIRO ASNO., AK**  
**A-553**

## LAMPIRAN FOTO



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Delegasi kepada Bapak Musurifun Lajawa di Kedutaan Republik Indonesia untuk Republik Ceko



Pertemuan Delegasi dengan Bapak Musurifun Lajawa





Pertemuan Delegasi dengan Mr. Marek Benda dan Mrs Zuzana Ozanova



Penyerahan cenderamata kepada Mr Marek Benda



Delegasi berfoto bersama di depan Kedutaan Besar Indonesia di Praha



Suasana pertemuan dengan Komisi Hukum dan Konstitusi





Berfoto bersama Mr Marek Benda dan Mrs Zuzana Ozanova setelah pertemuan



Penyerahan cenderamata oleh Ketua Delegasi kepada Mr Marek Benda di Ruang Komisi Hukum dan Konstitusi Republik Ceko